BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah berwenang dalam mengatur kehidupan bernegara, menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab pada kehidupan rakyatnya. Peranan pemerintah sangat besar dalam menjalankan kehidupan masyarakatnya.

Salah satu fungsi negara adalah melindungi negara dan rakyatnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya tersebut pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal yang besar. Untuk memperoleh dana yang besar, pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penerimaan negara yang masuk dalam APBN adalah penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu jenis penerimaan yang bersumber dari dalam negeri, sering dikemukakan bahwa pemungutan pajak masih perlu ditingkatkan lagi, sejalan dengan perkembangan yang ada dan disadari bahwa banyak masalah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sehingga menuntut adanya penyempurnaan undang-undang perpajakan, diharapkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dapat lebih maksimal.

Disisi lain masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditujukan melalui keikutsertanya dalam pembiayaan negara. Maka pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana. Pajak yang dipungut berdasarkan asas keadilan, dimana hanya warga negara yang memiliki kemampuan yang dipungut pajak untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sekarang dengan adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Salah satu agenda rutin tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penerimaan laporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Dalam proses penyelenggaraannya, DJP menunjuk setiap Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan penerimaan SPT Tahunan bagi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja masing-masing.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Tony Marsyahrul, 2006:46)

SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang diisi oleh wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu SPT PPh Orang Pribadi OP dan SPT PPh Badan. Berdasarkan informasi dari kepala seksi pelayanan KPP Pratama Bandung Karees mengenai jumlah SPT bahwa SPT PPh OP memiliki penerimaan pelaporan SPT lebih banyak dibandingkan SPT PPh Badan.

Proses pengolahan SPT secara benar dan lengkap merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT, baik meliputi penatausahaan yang meliputi penerimaan SPT, pencatatan/perekaman (*recording*) SPT, penggolongan SPT dan penyimpanan (*filling*) dokumen SPT maupun dalam pelayanan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. (PER-1:2010)

Kendala yang terjadi setiap tahun dalam pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan adalah terjadi penumpukan Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunannya, dikarenakan Wajib Pajak cenderung melaporkan SPT Tahunannya pada hari-hari terakhir batas akhir pelaporan, yaitu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (30 April) untuk Wajib Pajak Badan. (Syahriza:2010)

Perlu disadari bahwa *raw material* Direktorat Jendral Pajak adalah data. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu prosedur pengolahan data informasi perpajakan, salah satunya berupa Surat Pemberitahuan (SPT) secara memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kualitas dan keamanan

data perpajakan dengan kebijakan yang diterapkan yang dibuat oleh pemerintah mengenai fasilitas perpajakan.

Oleh karena itu, dengan berusaha untuk selalu mengedepankan layanan kepada wajib pajak, saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak kembali memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan. Dengan pemikiran untuk lebih melayani Wajib Pajak dan menghindari antrian yang sangat panjang akibat membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang sangat disederhanakan, dibuatlah fasilitas perpajakan bahwa penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja yaitu melalui *Drop Box* SPT Tahunan.

Drop Box adalah tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima. *Drop Box* ini, sesuai namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP dan lubang seperti celengan tempat memasukkan SPT Tahunan. *Drop Box* ini ditempatkan pada tempat yang memang strategis, seperti pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan pojok pajak/mobil pajak/*drop box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak. (PER-1:2010)

Berdasarakan informasi dari kepala seksi pelayanan KPP Pratama Bandung Karees tahun 2010, dengan adanya fasilitas *drop box* terbukti dapat mengurangi antrian Wajib Pajak pada saat pelaporan dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi WP dan jumlah penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 mengalami peningkatan yang terdiri dari sekitar 34,3 % untuk SPT PPh OP dan 5 % untuk SPT PPh Badan. Dari informasi tersebut, jumlah penerimaan SPT PPh OP lebih meningkat dibandingkan SPT PPh Badan.

Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian yang lebih terfokus kepada SPT Tahunan PPh OP yang lebih banyak mengalami peningkatan dengan adanya fasilitas *drop box*.

Walaupun telah adanya undang-undang yang mengatur masalah perpajakan serta adanya aparat pemerintah yang mengatur secara khusus menangani masalah perpajakan dengan memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan, tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemukan berbagai masalah.

Berdasarkan informasi dari kepala seksi pelayanan KPP Pratama Bandung Karees tahun 2010 bahwa penerimaan melalui *drop box* menyebabkan adanya penumpukan SPT karena dapat menerima SPT dari wilayah manapun. Adapun fenomena yang berkaitan dengan jumlah WP orang pribadi, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi

Keterangan	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
WP Aktif	34.402	52.355	57.604
WP *Non* Aktif	14.406	10.003	9.939
Total WP	48.808	62.358	67.543

(Sumber : Data Seksi Pelayanan KPP Pratama Bandung Karees, 2010)

Berdasarkan data diatas, terbukti masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, itu terlihat dari data jumlah WP *non* aktif. Data itu menunjukan bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT.

Kemudian fasilitas perpajakan *drop box* yang bertujuan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT, namun sebaliknya bagi petugas pajak menyebabkan adanya beban baru karena dengan *drop box*, SPT dapat

dilaporkan di wilayah manapun. Sehingga dalam proses pengolahan SPT, petugas pajak sebelumnya harus mengelompokan SPT yang masuk ke dalam wilayahnya dan mengirimkan SPT yang terdaftar di wilayah lain ke KPP wilayah tersebut. Serta pada pelaksanaannya petugas pajak jadi mempunyai beban ganda karena petugas pajak harus tetap melakukan penelitian setelah SPT diterima, lalu meminta kelengkapan bila SPT belum lengkap, kemudian melakukan perekaman dan seterusnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan menjadikannya sebagai bahan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dan merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang, yang penulis tuangkan dalam judul **"Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Fasilitas *Drop Box* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian tersebut diatas, maka pokok-pokok masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT.
2. Fasilitas *drop box* menyebabkan adanya penumpukan SPT karena dapat menerima SPT dari wilayah manapun.

3. Adanya beban baru bagi petugas pajak karena dengan fasilitas *drop box*, SPT dapat dilaporkan di wilayah manapun. Sehingga petugas pajak harus mengelompokan SPT yang masuk ke dalam wilayahnya dan mengirimkan SPT yang terdaftar di wilayah lain ke KPP wilayah tersebut.
4. Petugas pajak juga mempunyai beban ganda karena harus tetap melakukan penelitian setelah SPT diterima, lalu meminta kelengkapan bila SPT belum lengkap, kemudian melakukan perekaman dan seterusnya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Pokok-pokok permasalahan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengolahan SPT Tahunan Orang Pribadi Pajak Penghasilan dengan fasilitas *drop box* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Kendala dan Upaya dalam pelaksanaan pengolahan SPT Tahunan Orang Pribadi Pajak Penghasilan dengan fasilitas *drop box* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi serta mengetahui gambaran yang terjadi pada KPP Pratama Bandung

Karees tentang tata cara pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan fasilitas *drop box*.

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana keadaan dilapangan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengolahan SPT Tahunan Orang Pribadi Pajak Penghasilan dengan fasilitas *drop box* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan pengolahan SPT Tahunan Orang Pribadi Pajak Penghasilan dengan fasilitas *drop box* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perbagai pihak, kegunaan tersebut antara lain :

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yag lebih luas. Terutama mengenai tata cara pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan fasilitas *drop box*. Selain itu penulis juga ingin mngetahui mengenai salah satu fasilitas baru yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yaitu fasilitas *drop box.*

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil dari penelitian diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya.

3. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

   Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan. Serta dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi dan pembaca pada umumnya dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi KPP Pratama Bandung Karees

   Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi instansi guna mengevalusi kembali mengenai tata cara pengolahan data SPT Tahunan Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box.*

2. Bagi Seksi Pelayanan

   Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan bagi seksi pelayanan dalam melakukan pengolahan data SPT Tahunan Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box.*

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracondong No. 372 Bandung).

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang dilaksanakan pada bulan Maret 2010 sampai dengan Juli 2010.

Tabel. 1.2
***Time Schedule* Pelaksanaan Penelitian**

No.	Keterangan	Waktu Kegiatan					
		Feb 2010	Maret 2010	April 2010	Mei 2010	Juni 2010	Juli 2010
1.	**Tahap Persiapan**						
	a. Penyusunan Usulan Penelitian						
	b. Pengumpulan Usulan penelitian						
2.	**Tahap Pelaksanaan**						
	a. Pegumpulan Data Perusahaan						
3.	**Tahap Pelaporan**						
	a. Bimbingan Laporan Tugas Akhir						
	b. Pengumpulan Laporan Tugas Akhir						
4.	**Tahap Pengujian**						
	a. Sidang						
	b. Revisi Laporan Tugas Akhir						